



PERBAHAN RENJA 2025
DINAS KEPEMUDAAN OLAHAGA DAN PARIWISARTA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perubahan PD) merupakan dokumen rencana daerah yang mana terdapat penyesuaian – penyesuaian dengan keadaan yang dibutuhkan pada tahun berjalan sehingga berperan vital dalam mengarahkan program kegiatan serta subkegiatan pelayanan Perangkat Daerah satu tahun kedepan. Renja Perubahan Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja Perubahan Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah.

Renja Perubahan Perangkat Daerah memuat rencana pelayanan baik kepada masyarakat maupun pada sesama Perangkat Daerah lainnya yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan adanya perubahan terhadap agenda pembangunan yang lebih mengedepankan pada pencapaian kesejahteraan dan pemerintahan yang berdayasaing, maka untuk menghadapi tantangan dan perubahan di tahun 2025, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam melaksanakan strategi sebagai upaya pencapaian sasaran telah merumuskan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2025 kedalam 5 (Lima) Program dengan sumberdana berasal dari APBD Kabupaten Lampung Barat.

Liwa, 29 April 2025

Kepala Dinas
Kepemudaan Olahraga Dan
Pariwisata
Kabupaten Lampung Barat



Drs. Dahlin, M.Pd

PEMBINA TK. I

NIP. 19671001 199512 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat(11) yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan kedalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ininantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat(2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.” Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025. Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

1.2 Landasan Hukum

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat dibentuk Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. yang dilandasi oleh beberapa aturan hukum yang mengatur keberadaan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 4 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
9. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor I Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Pintu Kabupaten Lampung Barat secara berkesinambungan. Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melaksanakan aktifitas di Kabupaten Lampung Barat, sehingga terwujud sinergitas antar pelaku dan kegiatan pembangunan khususnya pembangunan di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 5 program, jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 13 kegiatan dan jumlah sub kegiatan termasuk sub kegiatan rutin sebanyak 36 sub kegiatan. Target kinerja jumlah kunjungan wisatawan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sudah terealisasi 269.167 jumlah kunjungan wisatawan.. Kemudian untuk alokasi dana tahun 2025 untuk Belanja sebesar Rp. 7.799.586.368,- terealisasi sampai dengan triwulan I sebesar Rp1.184.819.421,- atau 15,19%. Dari seluruh sub kegiatan terdapat 36) Sub kegiatan yang realisasi fisik atau kinerja keluarannya belum mencapai 100 persen, yaitu :

1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, realisasi fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan ini sampai dengan triwulan I output kinerja belum 100,00 persen.
2. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, realisasi fisik/output sebesar 0,00 persen, karena sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan I output kinerja belum 100,00 persen.

3. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD,realisasi fisik/output sebesar 0,00 persen, realisasi fisik/output sebesar 0,00persen, karena sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan I output kinerja belum 100,00
4. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, realisasi fisik/outputsebesar 0,00 persen, realisasi fisik/output sebesar 0,00 persen, karenasesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan I outputkinerja belum 100,00 persen.
5. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD,realisasi fisik/output sebesar 0,00 persen, realisasi fisik/output sebesar 0,00persen, karena sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan I output kinerja belum 100,00 persen.
6. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, realisasi fisik/output sebesar 50,00 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan II output kinerja belum 100,00 persen.
7. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, realisasi fisik/output sebesar 15 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan I output kinerja belum 100,00 persen.
8. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, realisasi fisik/output sebesar 24,29 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan I output kinerja belum 100,00 persen.

9. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, realisasi fisik/output sebesar 0,00 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan I output kinerja belum 100,00persen.
10. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, realisasi fisik/output sebesar 50,00persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuaidengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan II output kinerja belum 100,00 persen.
11. Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis, realisasi fisik/output sebesar 15,72 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai100,00 persen karena sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan II output kinerja belum 100,00 persen.
12. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, realisasi fisik/output sebesar 54,33 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan I output kinerja belum 100,00 persen.
13. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, realisasi fisik/output sebesar 19,35 % persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan I output kinerja belum 100,00 persen.
14. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan, realisasi fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan I output kinerja belum 100,00 persen.

15. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, realisasi fisik/output sebesar 25 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan I output kinerja belum 100,00 persen.

16. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, realisasi fisik/output sebesar 13,37 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sub kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi yang diperlukan.
17. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, realisasi fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sub kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi yang diperlukan.
18. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, realisasi fisik/output sebesar 11,13 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai realisasi kinerja disesuaikan dengan jumlah surat masuk dan surat keluar selama triwulan I.
19. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, realisasi fisik/output sebesar 13,37 % persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan I output kinerja belum 100 persen.
20. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, realisasi fisik/output sebesar 8,58 % persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulanII output kinerja belum 100 persen.
21. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, realisasi fisik/output sebesar 10,77 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan I output kinerja belum 100,00 persen.

22. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, realisasi fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan I output kinerja belum 100,00 persen.
23. Sub Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor, realisasi fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena belum berjalan kegiatan sampai dengan triwulan I output kinerja belum 100 persen
24. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota, realisasi fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena tidak sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan I output kinerja belum 100,00 persen.
25. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota, realisasi fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena kegiatan belum berjalan sampai dengan triwulan I output kinerja belum 100,00 persen.
26. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota, realisasi fisik/output sebesar 11,80 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena kegiatan belum sepenuhnya berjalan sampai dengan triwulan I output kinerja belum 100,00 persen.
27. Sub Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota, realisasi fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen

- karena kegiatan belum berjalan sampai dengan triwulan II output kinerja belum 100,00 persen.
28. Sub Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat, realisasi fisik/output sebesar 19,22 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena kegiatan selesai berjalan sampai dengan triwulan I output kinerja belum 100,00 persen.
 29. Sub Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, realisasi fisik/output sebesar 20,28 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena kegiatan selesai berjalan sampai dengan triwulan I output kinerja belum 100,00 persen.
 30. Sub Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, realisasi fisik/output sebesar 3,15 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena kegiatan selesai berjalan sampai dengan triwulan I output kinerja belum 100,00 persen.
 31. Sub Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, realisasi fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena kegiatan selesai berjalan sampai dengan triwulan I output kinerja belum 100,00 persen.
 32. Sub Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri, realisasi fisik/output sebesar 21,03 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena kegiatan belum berjalan sampai dengan triwulan I output kinerja belum 100,00 persen
 33. Sub Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri, realisasi fisik/output sebesar 12,73 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena kegiatan

belum berjalan sampai dengan triwulan I output kinerja belum 100,00 persen

34. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri, Baik Dalam dan Luar Negeri, realisasi fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena kegiatan belum berjalan sampai dengan triwulan I output kinerja belum 100,00 persen

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program , Kegiatan dan Subkegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 yang dituangkan dalam Bab III ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk Matrik Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan OPD yang menanganinya.

Uraian Rencana Program dan Kegiatan yang disajikan dalam Bab III ini adalah bersifat menyeluruh, yang didanai oleh APBD Pergeseran / Perubahan Kabupaten Lampung Barat tahun 2025. Adapun rincian Rencana Program , Kegiatan dan Subkegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Jumlah Anggaran belanja pada RKPD/Renja Murni tahun 2025 sebesar Rp. 13.185.154.045,-
2. Jumlah anggaran Belanja pada APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp. 7.799.586.368,-
3. Jumlah anggaran yang bertambah akibat akibat refocusing tahun 2025 sebesar Rp. –
4. Jumlah anggaran yang berkurang akibat pergeseran tahun 2025 sebesar Rp. 618.715.970,-
5. Jumlah subkegiatan yang ditunda pelaksanaannya akibat pergeseran tahun 2025 sebanyak : 0 Sub Kegiatan (Perubahan target indikator dari jumlah 2 event menjadi 1 event)
6. Jumlah subkegiatan yang baru muncul akibat refocusing tahun 2025 sebanyak 0 subkegiatan

7. Jumlah subkegiatan yang direncanakan ditunda pelaksanaannya pada Perubahan APBD tahun 2025 sebanyak 0 subkegiatan
8. Jumlah subkegiatan yang baru muncul pada perubahan APBD tahun 2025 sebanyak 1 kegiatan

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam menunjang tercapainya target dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Rencana Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan I Tahun 2025. Demikian perubahan rencana kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 untuk dipedomani pada tataran implementasi, keberhasilan pelaksanaan renja OPD Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat akan terlaksana semaksimal mungkin apabila semua aparatur berpartisipasi aktif sesuai dengan komitmen bersama, mantapnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat.

Liwa, 29 April 2025

Kepala Dinas
Kepemudaan Olahraga Dan
Pariwisata

Kabupaten Lampung Barat



Liwi Dahlin, M.Pd

PEMBINA TK. I

NIP. 19671001 199512 1 001

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan Tahun 2023+2024	Target Kinerja DPA Tahun 2025	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025		Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025		
										Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9=5+7	10=9/4	
					Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						#DIV/0!	0	#DIV/0!	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						#DIV/0!	0	#DIV/0!	
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						#DIV/0!	0	#DIV/0!	
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	68.09	72.75	68.03	75.36	111%	148.11	218%	
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	24	48	24	6	25%	54	225%	
2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	8	4	2	50%	10	250%	
2	19	01	2.02	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	4	2	1	50%	5	250%	
2	19	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	4	2	0	0%	4	200%	
2	19	01	2.04	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	2	1	1	100%	3	300%	
2	19	01	2.05	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	2	1	0	0%	2	200%	

[illegible]

2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	24	12	3	25%	27	225%	
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	22	44	12	3	25%	47	214%	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	2	1	0	0%	2	200%	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	24	12	3	25%	27	225%	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	24	12	3	25%	27	225%	
2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	24	12	3	25%	27	225%	
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	22	44	12	3	25%	47	214%	
2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	2	1	0	0%	2	200%	
2	19	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	24	12	3	25%	27	225%	
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	24	12	3	25%	27	225%	
2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	15	1	2	0	0%	1	7%	
2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	1	2	0	0%	1	7%	
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	24	12	3	25%	27	225%	

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	24	12	3	25%	27	225%	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	24	12	3	25%	27	225%	
2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	24	12	3	25%	27	225%	
2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	24	12	3	25%	27	225%	
2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	24	12	3	25%	27	225%	
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	20	10	4	0.4	24	2.4	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	2	1	0	0	2	2	
2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	20	10	4	0.4	24	2.4	
2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	2	1	0	0	2	2	
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Jumlah Pemuda berprestasi	0.24	0.19	0.21	0	0	0.19	0.8	
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	1	2	1	0	0	2	2	

						Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30	25	15	0	0	25	0.8	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	30	25	15	0	0	25	0.8	
2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1	2	1	0	0	2	2	
2	19	02	2.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	30	25	15	0	0	25	0.8	
2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	30	25	15	0	0	25	0.8	
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Jumlah Atlet Berprestasi	4.4	15	3.8	0	0	15	3.4	
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	24	6	24	0	0	6	0.25	
2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	24	6	24	0	0	6	0.25	
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1	2	1	0	0	2	2	

2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1	2	1	0	0	2	2	
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1	2	1	0	0	2	2	
2	19	03	2.05	0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1	2	1	0	0	2	2	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pengelolaan destinasi pariwisata Persentase pengelolaan destinasi pariwisata dan Jumlah desa wisata	32	44.9	32	0	0	44.9	1.4	
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembang	3	3	3	0	0	3	1.0	
						Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	10	30	3	0	0	30	3	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata	7	14	6	0	0	14	2.0	
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3	3	3	0	0	3	1	
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	10	30	3	1	0.33	31	3.1	

3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	7	14	6	2	0.33	16	2.29	
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	persentase destinasi pariwisata yang dipromosikan	100	50	75	0	0	44.9	1.403125	
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1	2	1	0	0	3	1	
						Jumlah Dokumen hasil Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1	2	1	0	0	3	1	
						Jumlah Kegiatan pemasaran Pariwisata baik dalam dan Luar negeri	5	2	3	0	0	3	1	
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1	2	1	0	0.00	2	2.00	
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5	2	3	0	0.00	2	0.40	
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1	2	1	0	0.00	2	2.00	

LAMPIRAN I
EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Akhir Tahun 2026	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan Tahun 2023+2024	Target Kinerja DPA Tahun 2025	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025		Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025		
										Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9=5+7	10=9/4	
					Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						#DIV/0!	0	#DIV/0!	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						#DIV/0!	0	#DIV/0!	
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						#DIV/0!	0	#DIV/0!	
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	68.09	72.75	68.03	75.36	111%	148.11	218%	
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	24	48	24	6	25%	54	225%	
2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	8	4	2	50%	10	250%	
2	19	01	2.02	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	4	2	1	50%	5	250%	
2	19	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	4	2	0	0%	4	200%	
2	19	01	2.04	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	2	1	1	100%	3	300%	

2	19	01	2.05	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	2	1	0	0%	2	200%	
2	19	01	2.06	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	8	4	0	0%	8	200%	
2	19	01	2.07	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	20	10	2	20%	22	220%	
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	4	8	4	0	0%	8	#VALUE!	
						Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	29	58	29	29	100%	87	300%	
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	58	29	29	100%	87	300%	
2	19	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	2	2	0	0%	2	200%	
2	19	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	4	2	0	0%	4	200%	
2	19	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	2	1	0	0%	2	200%	
2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	2	1	0	0%	2	200%	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	0	1	0	0%	0	0%	
2	19	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	2	1	0	0%	2	200%	

2	19	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	0	1	0	0%	0	0%	
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	24	12	3	25%	27	225%	
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	22	44	12	3	25%	47	214%	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	2	1	0	0%	2	200%	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	24	12	3	25%	27	225%	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	24	12	3	25%	27	225%	
2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	24	12	3	25%	27	225%	
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	22	44	12	3	25%	47	214%	
2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	2	1	0	0%	2	200%	
2	19	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	24	12	3	25%	27	225%	
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	24	12	3	25%	27	225%	
2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	15	1	2	0	0%	1	7%	
2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	1	2	0	0%	1	7%	

2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	24	12	3	25%	27	225%	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	24	12	3	25%	27	225%	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	24	12	3	25%	27	225%	
2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	24	12	3	25%	27	225%	
2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	24	12	3	25%	27	225%	
2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	24	12	3	25%	27	225%	
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	20	10	4	0.4	24	2.4	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	2	1	0	0	2	2	
2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	20	10	4	0.4	24	2.4	
2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	2	1	0	0	2	2	
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Jumlah Pemuda berprestasi	0.24	0.19	0.21	0	0	0.19	0.8	

2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	1	2	1	0	0	2	2	
						Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30	25	15	0	0	25	0.8	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	30	25	15	0	0	25	0.8	
2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1	2	1	0	0	2	2	
2	19	02	2.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	30	25	15	0	0	25	0.8	
2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	30	25	15	0	0	25	0.8	
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Jumlah Atlet Berprestasi	4.4	15	3.8	0	0	15	3.4	
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	24	6	24	0	0	6	0.25	

2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	24	6	24	0	0	6	0.25	
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1	2	1	0	0	2	2	
2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1	2	1	0	0	2	2	
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1	2	1	0	0	2	2	
2	19	03	2.05	0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1	2	1	0	0	2	2	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pengelolaan destinasi pariwisata Persentase pengelolaan destinasi pariwisata dan Jumlah desa wisata	32	44.9	32	0	0	44.9	1.4	
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembang	3	3	3	0	0	3	1.0	
						Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	10	30	3	0	0	30	3	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata	7	14	6	0	0	14	2.0	

3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3	3	3	0	0	3	1	
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	10	30	3	1	0.33	31	3.1	
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	7	14	6	2	0.33	16	2.29	
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	persentase destinasi pariwisata yang dipromosikan	100	50	75	0	0	44.9	1.403125	
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1	2	1	0	0	3	1	
						Jumlah Dokumen hasil Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1	2	1	0	0	3	1	
						Jumlah Kegiatan pemasaran Pariwisata baik dalam dan Luar negeri	5	2	3	0	0	3	1	
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1	2	1	0	0.00	2	2.00	
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5	2	3	0	0.00	2	0.40	
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1	2	1	0	0.00	2	2.00	

